

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SENIN, 20 SEPTEMBER 2010**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2010
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Drs. Riyadi Santoso/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : **Membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2011 (Lanjutan RDP tanggal 2 September 2010)**
Kehadiran : 39 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI
11 orang izin

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Muslim, SH
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ H. M. Izzul Islam
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Mestariyany Habie, SH
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si

IZIN :

- ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ Vanda Sarundajang
- ◆ Drs. Al Muzzamil Yusuf
- ◆ TB. Soenmanjaja. SD
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 14.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Pagu Sementara mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp13.261.679.349.000,-** yang dialokasikan untuk melaksanakan 82 Kegiatan yang tercakup dalam 13 (tiga belas) Program.
- Berdasarkan sumber pendanaanya, Pagu Sementara Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 terdiri atas :
 1. Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp11.556.710.469.000,-** yang terdiri dari Pagu Mengikat sebesar **Rp450.709.233.000,-** dan Pagu tidak mengikat sebesar **Rp11.106.001.236.000,-**
 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp26.083.980.000,-**
 3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar **Rp1.678.884.900.000,-**
- Anggaran Kementerian Dalam Negeri dimaksud akan dikelola ditingkat Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pusat sebesar **Rp3.661.856.119.000,- (27,61%)**
 2. Daerah sebesar **Rp9.599.823.230.000,- (72,39%)** yang mencakup :
 - a. Dekonsentrasi sebesar **Rp1.131.934.949.000,-**
 - b. Tugas Pembantuan sebesar **Rp209.396.833.000,-**
 - c. Urusan Bersama sebesar **Rp8.258.491.448.000,-**
- Dari Pagu Sementara tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan Penambahan Pagu RAPBN Kementerian Dalam Negei Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp3.630.215.000.000,-**

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, ada beberapa catatan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran dan penentuan rencana kegiatan yang dilaksanakan benar-benar harus fokus dan relevan dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tidak tumpang tindih dengan Kementerian/Lembaga lainnya.
2. Komisi II DPR RI menerima usulan anggaran Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011 Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp13.261.679.349.000,-**, namun belum dapat menyetujui pengalokasian anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Dalam Negeri melakukan realokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI. Terkait dengan persetujuan

tersebut hanya untuk pengalokasian untuk kegiatan dalam belanja mengikat, sedangkan untuk belanja tidak mengikat Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan revisi terhadap rincian kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus menyampaikan penjelasan yang lebih terperinci dengan memperhatikan seluruh masukan dari Komisi II DPR RI, misalnya antara lain:

a. Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Agar diprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah, seperti kantor-kantor pemerintahan di Daerah Otonom Baru, disamping itu dalam pengalokasian anggaran haruslah memperhatikan pula aspirasi dan kebutuhan daerah.

b. Ditjen Pemerintahan Masyarakat Desa

Agar memprioritaskan pengalokasian dana PNPM pada desa-desa yang terpencil dan dalam pengalokasiannya tersebut harus benar-benar adil dan transparan.

c. Ditjen Administrasi Kependudukan

Agar dalam pengalokasian anggarannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sekaligus target-target yang harus dicapai terutama yang berkaitan dengan pengembangan SIAK (pemberian NIK dan penerapan *e-KTP*)

d. Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Agar lebih memaksimalkan upaya-upaya penguatan integrasi nasional dengan melakukan pencegahan dini terhadap potensi-potensi konflik.

e. Ditjen Otonomi Daerah

Agar memperhatikan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penataan Daerah Otonom Baru.

f. Ditjen Pemerintahan Umum

- Agar pengalokasian anggaran untuk penanganan masalah-masalah perbatasan harus lebih fokus pada pendekatan kesejahteraan
- Khusus terkait dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Komisi II DPR RI meminta untuk dipercepat operasionalnya. Untuk itu BNPP harus segera menyampaikan pula rencana kegiatan dan anggarannya secara rinci.

3. Terkait dengan usulan Tambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp3.630.215.000.000,-**, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar dapat dialokasikan sebagian dari Pagu APBN Tahun 2011, dengan melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pada beberapa kegiatan yang belum urgent sifatnya. Sedangkan sebagian lagi agar diusulkan lagi pada APBN Perubahan Tahun 2011 dan atau APBN Tahun 2012.

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB.

**JAKARTA, 20 September 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178**